



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG  
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN  
LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak suatu kejadian yang menghambat pencapaian tujuan atau sasaran instansi pemerintah perlu dilakukan penanganan risiko secara tepat dengan melakukan penilaian risiko serta penetapan kegiatan pengendalian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, maka KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro telah melaksanakan penilaian risiko level entitas serta telah merumuskan kegiatan pengendalian, yang hasilnya harus ditetapkan dalam sebuah Keputusan yang mengikat, supaya dapat dilaksanakan semua unsur dalam lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang

Penetapan...

Penetapan Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

Negara...

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 10/PR.01.3-Kpt/7109/Kab/VIII/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2020 - 2024;
12. Keputusan...

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 13/PR.03/7109/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2020-2024.

Memerhatikan: 1. Laporan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang Pelaksanaan Penilaian Risiko Level Entitas beserta lampirannya berupa Kertas Kerja Penilaian Risiko Level Entitas;

2. Berita Acara Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 32/PK.01-BA/7109/2022 tanggal 6 Juni 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdiri dari:

- a. Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal sebagaimana Lampiran I Keputusan ini;
- b. Kriteria dan Skala yang digunakan dalam penilaian risiko, sebagaimana Lampiran II Keputusan ini;
- c. Penetapan Tujuan Level Entitas, sebagaimana Lampiran III Keputusan ini;

d. Identifikasi...

- d. Identifikasi Risiko, sebagaimana Lampiran IV Keputusan ini;
- e. Analisis Risiko yang diformulasikan dalam Peta Risiko, Lampiran V Keputusan ini;
- f. Indikator Risiko/Evaluasi Risiko, sebagaimana dalam Lampiran VI Keputusan ini; dan
- g. Kegiatan Pengendalian atau Rencana Aksi Pengendalian Risiko sebagaimana Lampiran VII Keputusan ini.

KETIGA : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA, menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam melakukan kegiatan pengendalian level entitas.

KEEMPAT : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali di setiap tahun.

KELIMA : Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ondong Siau  
pada tanggal 6 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

ttd

STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
Kepala Sub-Bagian Hukum



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU  
TAGULANDANG BIARO  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO  
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL  
ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG  
BIARO TAHUN 2022

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL

**ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL**

<b>N O</b>	<b>KATEGORI RISIKO</b>	<b>TOPIK RISIKO</b>	<b>PERNYATAAN RISIKO</b>	<b>POTENSI DAMPAK</b>	<b>REFERENSI</b>
<b>I</b>	<b>EKSTERNAL</b>				
<b>1</b>	<b>Sosial &amp; Politik</b>	Regulasi yang terlambat ditetapkan	Kurang memahami peraturan dengan baik	Pelaksanaan tahapan tidak sesuai dengan regulasi	Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020
		Komunikasi antar lembaga	Perbedaan pemahaman	Implementasi dalam penegakan aturan tidak maksimal	Sda
		Birokrasi	Keterlambatan dalam pengambilan keputusan	KPU tidak maksimal dalam menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan birokrasi eksternal	Sda
		Pelanggaran Administrasi Pemilu	Tidak Memenuhi syarat sebagai peserta pemilu	Sengketa pemilu	Sda
		Lokasi Pemukiman Penduduk	Pemilih tidak menggunakan hak pilih	Turunnya partisipasi pemilih di daerah tersebut	Sda
		Belum ditetapkannya program tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024	Terciptanya opini, asumsi dan wacana yang beragam dikalangan masyarakat	Terjadi kegamangan ditengah masyarakat atas ketidakpastian pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024	Perkembangan RDP Penyelenggara Pemilu dengan DPR dan Pemerintah di Akhir Tahun 2021
		Partai Politik yang mempengaruhi keputusan dari KPU	KPU tidak mandiri dalam mengambil keputusan	Personil KPU tidak netral dalam mengambil keputusan, berpotensi mendapatkan sanksi kode etik	Laporan Tahunan DKPP Tahun 2019-2021
<b>2</b>	<b>Ekonomi</b>	Kondisi ekonomi akibat pandemi	Tidak adanya dukungan fasilitasi anggaran dari	Tidak berjalannya kegiatan Non Pemilu/Pemilih	Laporan KPU Kabupaten/Kota

N O	KATEGORI RISIKO	TOPIK RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	POTENSI DAMPAK	REFERENSI
			Pemerintah Kabupaten/Kota	an	
			Hanya sebagian kecil masyarakat yang peduli atas pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024	Menurunnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu dan Pilkada tahun 2024	
3	<b>Lingkungan</b>	Daerah rawan bencana	Adanya ketakutan masyarakat untuk datang ke TPS	Berkurangnya partisipasi masyarakat pengguna hak pilih	Laporan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020
		Letak geografis	Keterlambatan distribusi logistik untuk daerah kepulauan	Tertundanya pelaksanaan pemungutan suara	Sda
		Daerah padat penduduk	Gangguan kamtibmas	Terganggunya tahapan pemilihan	Sda
4	<b>Keuangan</b>	Anggaran Pemilihan	Anggaran yang disetujui tidak sesuai dengan perencanaan kebutuhan	Pencermatan dan optimalisasi anggaran kegiatan	Sda
			Keterbatasan anggaran	Berkurangnya volume sejumlah kegiatan misalnya sosialisasi dan rakor dengan pihak stakeholder	Sda
		Mekanisme Revisi Anggaran	Kebijakan yang sering berubah	tidak maksimalnya pelaksanaan tahapan	Sda
5	<b>IT &amp; Infrastruktur</b>	Jaringan Internet	Gangguan jaringan	Terhambatnya Penerimaan dan pengiriman informasi	Sda
		Keamanan Cyber	Terjadinya gangguan akses teknologi informasi	Terlambatnya penyampaian informasi ke masyarakat melalui jaringan IT	Materi Webinar Keamanan Cyber



N O	KATEGORI RISIKO	TOPIK RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	POTENSI DAMPAK	REFERENSI
<b>II INTERNAL</b>					
1	<b>Strategik</b>	Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	Belum ada kepastian jadwal, tahapan, program dan tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024	Dis-informasi terkait jadwal, program dan tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024	Perkembangan Informasi dimedia
2	<b>Personil</b>	kekurangan personil	Tidak meratanya distribusi pegawai di tiap-tiap sub bagian	Beban kerja bertambah,	Analisis SDM
		Kemampuan atau Kompetensi Personil	Kompetensi tidak merata di semua bagian	Produktifitas pegawai menurun	Evaluasi SDM
		Koordinasi dan Komunikasi antara Pimpinan dan Staf	Koordinasi tidak berjalan dengan baik	turunnya Kinerja Pegawai dan pelaksanaan kegiatan tidak maksimal	Hasil FGD internal
3	<b>Proses</b>	Kegiatan Tahapan dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	Perubahan tahapan, program dan Jadwal dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	Persiapan dan pelaksanaan yang kurang maksimal	Laporan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020
			Regulasi Teknis terlambat ditetapkan	mengakibatkan Legitimasi suatu keputusan yang tidak efektif	Sda
			Tidak adanya Dasar Hukum Asuransi Badan aAdhoc	Anggaran Asuransi bagi badan Adhoc	Sda
4	<b>IT dan Infrastuktur</b>	Sarana dan Prasarana	keamanan server yang kurang memadai	Terhambatnya proses digitalisasi data	Materi Webinar Keamanan Cyber
5	<b>Keuangan</b>	Keterbatasan Anggaran Pemilu Tahun 2024	Kurang maksimal dalam memfasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun	Berpotensi terjadinya gugatan/sengke ta Pemilu Tahun 2024	Laporan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020
				Bisa mengganggu	Sda

N O	KATEGORI RISIKO	TOPIK RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	POTENSI DAMPAK	REFERENSI
			2024	Partisipasi Masyarakat dalam memilih dalam Pemilu Tahun 2024	
6	Informasi	Media Sosial, media online	Kurangnya Informasi dan Pemberitaan terkait dengan Tahapan, Program dan Jadwal dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	Terhambatnya informasi ke masyarakat	Sda
		Misinformasi , Hoaks	masih terjadinya misinformasi dan hoaks di media sosial dan Media Online	Masyarakat sering menerima informasi yang berbeda atau tidak sesuai fakta	Sda

Ditetapkan di Ondong Siau  
pada tanggal 6 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

ttd

STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
Kepala Sub Bagian Hukum



ANITA SOPHYA TAMPI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU  
TAGULANDANG BIARO  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO  
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL  
ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG  
BIARO TAHUN 2022

KRITERIA DAN SKALA YANG DIGUNAKAN DALAM PENILAIAN RISIKO

**KRITERIA DAN SKALA YANG DIGUNAKAN DALAM PENILAIAN RISIKO**

A. KRITERIA DAN SKALA <b>KEMUNGKINAN</b> TERJADINYA RISIKO			
NO	KRITERIA KEMUNGKINAN	DEFINISI KRITERIA KEMUNGKINAN	SKALA NILAI
1	Sangat Kecil	Sangat kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	1
2	Kecil	Kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	2
3	Moderat	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun	3
4	Hampir Pasti	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	4
5	Pasti	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	5

B. KRITERIA DAN SKALA <b>DAMPAK</b> TERJADINYA RISIKO			
No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Tidak Signifikan	Tidak berdampak pada pencapaian sasaran secara umum/Tidak ada Kerugian financial/Tidak ada cedera/Tidak ada dampak hukum/Risiko lingkungan tidak ada	1
2	Kecil	Mengganggu pencapaian sasaran meskipun tidak signifikan/Kerugian financial kecil/Perlu pertolongan pertama/Dampak hukum kecil/Risiko lingkungan kecil	2
3	Sedang	Mengganggu pencapaian sebagian sasaran secara signifikan/ Kerugian financial sedang/ Perlu penanganan medis/ Dampak hukum sedang/ Risiko lingkungan sedang	3
4	Besar	Sebagian sasaran tidak tercapai/ Kerugian financial besar/ Cidera yg meluas/ Dampak hukum besar/ Risiko lingkungan besar	4
5	Sangat besar/Katastrofik	Seluruh sasaran tidak tercapai/ Kerugian financial sangat besar/ kematian/ Dampak hukum sangat besar/ Risiko lingkungan sangat besar	5

C. LEVEL RISIKO : HASIL PERKALIAN NILAI KEMUNGKINAN DAN DAMPAK			
Range	Warna	Level Risiko	
21-25	<b>MERAH</b>	5	sangat tinggi
16-20	<b>ORANGE</b>	4	tinggi
11-15	<b>KUNING</b>	3	sedang
6-10	<b>BIRU</b>	2	rendah

1-5	HIJAU	1	sangat rendah
-----	-------	---	---------------

Ditetapkan di Ondong Siau  
pada tanggal 6 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

ttd

STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
Kepala Sub-Bagian Hukum



ANITA SOPHYA TAMPI

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU  
TAGULANDANG BIARO  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO  
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL  
ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG  
BIARO TAHUN 2022

PENETAPAN TUJUAN LEVEL ENTITAS

**PENETAPAN TUJUAN LEVEL ENTITAS**

<b>Unit Pemilik Risiko</b>	<b>: KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro</b>
<b>Periode Penerapan</b>	<b>: 2022</b>

<b>No</b>	<b>Tujuan dalam Renstra</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	<b>Permasalahan</b>
1	<b>Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas</b>	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase Keputusan KPU Kab yang sesuai SOP	Masih ditemukan adanya keputusan KPU Kab yang tidak sesuai SOP
		Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas	Presentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	1. Kepengurusan parpol yang berubah-ubah
				2. Dualisme kepengurusan parpol
				3. Mis-informasi dan kesalahan dokumen yang disampaikan partai politik
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi “BAIK”	Pemahaman tentang <i>road map</i> reformasi birokrasi, area perubahan dan peran agen perubahan serta aspek-aspek Indeks Reformasi Birokrasi masih belum merata
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	Target kinerja tidak tercapai
			Opini BPK atas Laporan Keuangan	Masih adanya temuan/konsep temuan dari APIP maupun BPK
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Belum diketahuinya standar penilaian keterbukaan informasi publik
2	<b>Menyelenggarakan Pemilu serentak yang Demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif.</b>	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.	Presentase partisipasi pemilih dalam pemilihan umum/pemilihan.	1. Terbatasnya dukungan Anggaran dalam proses sosialisasi pendidikan pemilih secara berkelanjutan
				2. Tingkat partisipasi yang tidak merata, dimana ada daerah yang tingkat

No	Tujuan dalam Renstra	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Permasalahan
				partisipasi tinggi, namun ada yang tingkat partisipasinya rendah.
			Presentase partisipasi pemilih <i>perempuan</i> dalam pemilihan umum/ pemilihan.	Terbatasnya dukungan Anggaran dalam proses sosialisasi pendidikan pemilih perempuan
			Presentase partisipasi pemilih <i>disabilitas</i> dalam pemilihan umum/ pemilihan.	1. Ketidaksesuaian data pemilih disabilitas dalam DPT dengan data pemilih dan pengguna hak pilih di TPS (Form C1)
				2. TPS tidak aksesibel/tidak ramah disabilitas
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilihan umum berbasis teknologi informasi yang berintegritas.	Presentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).	1. Masyarakat wajib pilih tidak mengurus KTP-el sehingga tidak didata saat coklit
				2. PPDP tidak maksimal melakukan coklit
				3. Pemilih pindah domisili tanpa mengurus perubahan dokumen kependudukan
				4. Pendataan pemilih untuk warga binaan yang ada di lapas dan rutan
3	<b>Mewujudkan pemilihan umum serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.</b>	Terwujudnya pemilihan umum serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.	Presentase Tahapan pemilihan umum/ pemilihan di Kabupaten yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal ketentuan yang berlaku.	Masih adanya keterlambatan dalam pelaksanaan tahapan tertentu, misalnya pada tahapan pengelolaan dan distribusi logistik
			Presentase KPU Kabupaten melaksanakan	1. Beberapa daerah rawan dari segi



No	Tujuan dalam Renstra	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Permasalahan
			pemilihan umum/pemilihan yang aman dan damai.	keamanan, misalnya daerah-daerah dengan potensi konflik tinggi
				2. Ujaran kebencian, fitnah dan hoax di media sosial yang memicu konflik
			Presentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	Kemampuan SDM untuk melakukan advokasi, misalnya menyusun jawaban Termohon masih belum merata

Ditetapkan di Ondong Siau  
pada tanggal 6 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

ttd

STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU  
TAGULANDANG BIARO  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO  
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL  
ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG  
BIARO TAHUN 2022

IDENTIFIKASI RISIKO

## IDENTIFIKASI RISIKO

<b>Unit Pemilik Risiko</b>	<b>: KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro</b>
<b>Periode Penerapan</b>	<b>: 2022</b>

No	Indikator Kinerja Utama (Key Performance indicator)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Keputusan KPU Kabupaten yang sesuai SOP	Masih adanya keputusan KPU Kabupaten yang tidak sesuai SOP	Kurangnya pemahaman SOP dari masing-masing sub bagian.	Divisi Hukum dan Pengawasan	1. Kurangnya sosialisasi SOP 2. Kurangnya kontrol terhadap SOP	Internal	C	1. Prosedur penyusunan keputusan tidak jalan 2. Kualitas keputusan tidak sesuai standar	KPU Kabupaten Sitaro	Sosialisasi SOP	Kurangnya pemahaman SOP dari masing-masing sub bagian.	Kebijakan dan Operasional
2	Presentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Masih ditemukan informasi mengenai Partai Politik yang di publikasikan pada publik terlambat di mutakhirkan (terlambat di update)	Kepengurusan Parpol yang berubah-ubah	Divisi Teknis	1. Dinamika internal partai politik 2. Konflik internal partai politik	Eksternal	UC	1. Terhambatnya pemutakhiran data Partai Politik 2. Informasi kepada publik tidak akurat	KPU Kabupaten Sitaro	1. Helpdesk SIPOL 2. Koordinasi dengan Partai Politik 3. Penyampaian informasi melalui Bakohumas	Kepengurusan Parpol yang berubah-ubah	Operasional
			Dualisme kepengurusan parpol	Divisi Teknis	s.d.a	Eksternal	UC	s.d.a	KPU Kabupaten Sitaro	s.d.a	Dualisme kepengurusan parpol	Operasional
			Mis-informasi dan kesalahan	Divisi Teknis	Petugas Penghubung dan Operator Partai Politik	Eksternal	UC	1. Tahapan verifikasi partai politik	KPU Kabupaten Sitaro	s.d.a	Mis-informasi dan kesalahan	Operasional

No	Indikator Kinerja Utama (Key Performance indicator)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			dokumen yang disampaikan partai politik		yang sering berganti			terhambat 2. Tim verifikasi kesulitan mencari alamat sekretariat partai politik			dokumen yang disampaikan partai politik	
3	Indeks Reformasi Birokrasi “BAIK”	Pemahaman tentang <i>road map</i> reformasi birokrasi, area perubahan dan peran agen perubahan serta aspek-aspek Indeks Reformasi Birokrasi masih belum merata	Kurangnya pemahaman terkait <i>roadmap</i> reformasi birokrasi, area perubahan dan peran agen perubahan serta aspek-aspek Indeks Reformasi Birokrasi	Divisi SDM	Kurangnya efektifnya sosialisasi tentang <i>road map</i> reformasi birokrasi, area perubahan dan peran agen perubahan serta aspek-aspek Indeks Reformasi Birokrasi	Internal	C	1. Mempengaruhi nilai Indeks Reformasi Birokrasi 2. Tidak maksimal pencapaian target pada delapan area perubahan reformasi birokrasi	KPU Kabupaten Sitaro	Sosialisasi kepada seluruh staf pelaksana	Kurangnya pemahaman terkait <i>roadmap</i> reformasi birokrasi, area perubahan dan peran agen perubahan serta aspek-aspek Indeks Reformasi Birokrasi	Operasional
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Target kinerja dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja tidak tercapai	Renstra dan target kinerja dalam perjanjian kinerja tidak tersosialisasi. Divisi dan unit kerja belum sepenuhnya terlibat dalam penilaian	Divisi Perencanaan	Tidak ada agenda khusus untuk sosialisasi renstra dan target kinerja dalam perjanjian kinerja. LAKIP hanya disusun oleh sub bagian perencanaan.	Internal	C	1. Nilai akuntabilitas kinerja tidak maksimal 2. Target tidak tercapai 3. Capaian kinerja tidak sesuai dengan	KPU Kabupaten Sitaro	1. Koordinasi dan pengawasan ditingkatkan 2. Optimalisasi perencanaan kinerja pegawai 3. Pengisian kartu kendali Sistem Akuntabilitas	Tidak ada agenda khusus untuk sosialisasi renstra dan target kinerja dalam perjanjian kinerja. Divisi dan unit kerja	Kebijakan, Kepatuhan, Operasional dan Keuangan

No	Indikator Kinerja Utama (Key Performance indicator)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			dan evaluasi kinerja saat penyusunan LAKIP setiap tahun anggaran.					realisasi anggaran		s Kinerja Instansi Pemerintah	belum sepenuhnya terlibat dalam penilaian dan evaluasi kinerja dalam penyusunan LAKIP setiap tahun anggaran.	
5	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Masih adanya temuan/konsep temuan dari APIP maupun BPK	Ketidakpatuhan terhadap prosedur pengelolaan anggaran	Divisi Keuangan	Pengendalian belum dilaksanakan secara menyeluruh terhadap potensi-potensi ketidakpatuhan dalam pengelolaan anggaran	Internal	C	1. Adanya temuan dari APIP/BPK. 2. Tuntutan Ganti Rugi (TGR). 3. Berurusan dengan APH	KPU Kabupaten Sitiro	1. Bimtek pengelolaan keuangan 2. Asistensi pendampingan dari APIP 3. Kartu kendali pengelolaan keuangan	Ketidakpatuhan terhadap prosedur pengelolaan anggaran	Keuangan, Kepatuhan dan Legal
6	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Belum diketahuinya standar penilaian keterbukaan informasi publik	Kurangnya pemahaman tentang standar penilaian keterbukaan informasi publik	Divisi SDM dan Parmas	Kurangnya informasi tentang standar penilaian keterbukaan informasi publik	Internal	C	1. Peringkat keterbukaan informasi publik yang belum sesuai harapan 2. Adanya pengaduan sengketa informasi publik	KPU Kabupaten Sitiro	1. Bimtek penguatan pelayanan informasi publik 2. SOP pelayanan informasi publik	Kurangnya pemahaman tentang standar penilaian keterbukaan informasi publik	Reputasi

No	Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Presentase partisipasi pemilih dalam pemilihan umum/pemilihan.	Terbatasnya dukungan Anggaran dalam proses sosialisasi pendidikan pemilih secara berkelanjutan	Terbatasnya volume kegiatan pendidikan pemilih	Divisi SDM dan Parmas	Kebijakan anggaran yang belum memadai untuk sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan	Internal	C	Pelaksanaan sosialisasi belum menjangkau seluruh segmen	KPU Kabupaten Sitaro	Optimalisasi anggaran	Terbatasnya volume kegiatan pendidikan pemilih	Operasional dan Anggaran
		Tingkat partisipasi tidak merata, dimana ada yang tingkat partisipasi tinggi, namun ada yang rendah	KPPS tidak maksimal mendistribusikan pemberitahuan untuk menggunakan hak pilih	Divisi SDM dan Parmas	Pemilih tidak menerima pemberitahuan untuk menggunakan hak pilih	Internal	C	Tingkat partisipasi tidak maksimal di wilayah tertentu	KPU Kabupaten Sitaro	Penguatan dan pengawasan terhadap tugas badan ad hoc	KPPS tidak maksimal mendistribusikan pemberitahuan untuk menggunakan hak pilih	Operasional
		Tingkat partisipasi yang tidak merata, dimana ada daerah yang tingkat partisipasi tinggi, namun ada yang tingkat partisipasinya rendah	Daya jangkau kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih terbatas	Divisi SDM dan Parmas	1. Kendala geografis 2. Keterbatasan akses teknologi dan informasi	Eksternal	UC	Tingkat partisipasi tidak maksimal di wilayah tertentu		Prioritas alokasi anggaran untuk daerah yang memiliki kendala geografis dan IT	Daya jangkau kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih terbatas	Operasional dan Anggaran
		Tingkat partisipasi yang tidak merata, dimana ada daerah yang tingkat partisipasi	Pemilih tidak dapat atau tidak mau menggunakan hak pilihnya		1. Pemilih tidak memahami mekanisme pindah memilih 2. Adanya	Eksternal	UC	Tingkat partisipasi tidak maksimal di wilayah tertentu	KPU Kabupaten Sitaro	Penguatan sosialisasi bagi daerah dengan tingkat partisipasi rendah	Masih ada Pemilih yang tidak dapat atau tidak mau menggunakan hak	Operasional

No	Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		tinggi, namun ada yang tingkat partisipasinya rendah			kelompok yang tidak menggunakan hak pilihnya karena merasa tidak ada pilihan yang cocok						pilihnya	
8	Presentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilihan umum/pemilihan.	Terbatasnya dukungan Anggaran dalam proses sosialisasi pendidikan pemilih perempuan	Terbatasnya volume kegiatan pendidikan pemilih segmen pemilih perempuan	Divisi SDM dan Parmas	Kebijakan anggaran yang belum memadai untuk sosialisasi pendidikan pemilih perempuan	Internal	C	Pelaksanaan sosialisasi pada pemilih perempuan belum terjangkau secara menyeluruh	KPU Kabupaten Sitaro	Optimalisasi anggaran	Terbatasnya volume kegiatan pendidikan pemilih segmen pemilih perempuan	Operasional dan Anggaran
9	Presentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilihan umum/pemilihan .	Ketidaksesuaian data pemilih disabilitas dalam DPT dengan data pemilih dan pengguna hak pilih di TPS (Form C1)	Badan adhoc kurang teliti mengisi formulir	Divisi SDM dan Parmas	Pemahaman pengisian formulir dalam bimtek tidak maksimal	Internal	C	Data tidak akurat	KPU Kabupaten Sitaro	Menerbitkan buku panduan KPPS	Badan adhoc kurang teliti mengisi formulir	Operasional
		TPS tidak aksesibel/tidak ramah disabilitas	Pembuatan TPS oleh KPPS tidak sesuai standar aksesibilitas	Divisi Teknis	KPPS tidak memahami atau tidak melaksanakan pembuatan TPS sesuai ketentuan	Internal	C	Pemilih disabilitas terhambat untuk menggunakan hak pilih	Pemilih	1. Sosialisasi kepada KPPS untuk pembuatan TPS 2. Kartu kendali standar aksesibilitas	Pembuatan TPS oleh KPPS tidak sesuai standar aksesibilitas	Operasional

No	Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Presentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).	Masyarakat wajib pilih tidak mengurus KTP-el sehingga tidak didata saat coklit	Pemilih tidak terdaftar dalam DPT	Divisi Data	1. Kurangnya kesadaran masyarakat 2. Kurangnya sosialisasi 3. Kendala - kendala teknis dalam perekaman KTP-el 4. Faktor geografis	Eksternal	UC	Pemilih berpotensi tidak bisa menggunakan hak pilih	Pemilih dan KPU Kabupaten Sitaro	Koordinasi dengan Stakeholder (dukcapil)	Pemilih tidak terdaftar dalam DPT	Operasiona
		PPDP tidak maksimal melakukan coklit	PPDP tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur	Divisi Data	1. Faktor SDM 2. Komitmen dalam melaksanakan tugas 3. Pengawasan dari PPS yang lemah	Internal	C	Data pemilih tidak akurat	KPU Kabupaten Sitaro	1. Bimtek PPDP 2. Menerbitkan buku kerja PPDP	PPDP tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur	Operasiona
		Pemilih pindah domisili tanpa mengurus perubahan dokumen kependudukan	PPDP tidak bisa mendata Pemilih yang pindah domisili tanpa dokumen kependudukan yang sesuai domisili	Divisi Data	1. Kurangnya kesadaran masyarakat 2. Kurangnya sosialisasi 3. Kendala - kendala teknis dalam penggantian KTP-el 4. Faktor geografis	Eksternal	C	Pemilih berpotensi tidak bisa menggunakan hak pilih	Pemilih dan KPU Kabupaten Sitaro	Koordinasi dengan Stakeholder (dukcapil)	PPDP tidak bisa mendata Pemilih yang pindah domisili tanpa dokumen kependudukan yang sesuai domisili	Operasional
		Pendataan pemilih untuk warga binaan	PPDP kesulitan mendata	Divisi Data	Dokumen kependudukan tidak	Eksternal	UC	Pemilih berpotensi tidak bisa	Pemilih dan KPU Kabupaten	1. Koordinasi dengan lapas/rutan	PPDP kesulitan mendata	Operasional



No	Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		yang ada di lapas dan rutan	pemilih di LAPAS/RUTAN		dipegang oleh warga binaan di lapas/rutan, bahkan ada yang tidak memiliki dokumen kependudukan.			menggunakan hak pilih dan dapat mengakibatkan konflik/kerusuhan di rutan/lapas	en Sitaro	2. Sosialisasi kepada warga binaan di lapas/rutan	pemilih di LAPAS/RUTAN	
11	Presentase Tahapan pemilihan umum/pemilihan di Kabupaten yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal ketentuan yang berlaku.	Masih adanya keterlambatan dalam pelaksanaan tahapan tertentu misalnya pada tahapan pengelolaan dan distribusi logistik	Manajemen pelaksanaan tahapan yang kurang optimal		1. Perencanaan kurang matang 2. Kuantitas SDM kurang	Internal	C	1. Terhambatnya tahapan pemilu/pemilihan 2. Penyelenggara bisa mendapatkan sanksi hukum	KPU Kabupaten Sitaro dan KPU Provinsi Sulut	1. Rapat Koordinasi di setiap tahapan 2. Merekrut tenaga pendukung 3. Internalisasi regulasi	Manajemen pelaksanaan tahapan yang kurang optimal	Operasional, Legal dan Reputasi
12	Presentase KPU Kabupaten melaksanakan pemilihan umum/pemilihan yang aman dan damai.	Terjadinya konflik dan permasalahan hukum di tahapan kampanye	Ujaran kebencian, fitnah dan hoax di media sosial yang memicu konflik	Divisi SDM dan Parmas	1. Pemilih/Tim Kampanye tidak bijak dalam menggunakan media sosial 2. Pemilih tidak memahami dampak hukum	Eksternal	UC	Konflik dan persoalan hukum	Pemilih	1. Sosialisasi 2. Penyuluhan hukum	Ujaran kebencian, fitnah dan hoax di media sosial yang memicu konflik	Legal dan Kepatuhan
13	Presentase sengketa hukum yang	Kemampuan SDM untuk melakukan	Tidak meratanya kemampuan	Divisi Hukum dan	Kurangnya pemahaman untuk	Internal	C	Advokasi kurang maksimal	KPU Kabupaten	1. Pelatihan 2. Bimtek	Tidak meratanya kemampuan	Operasional dan Legal

No	Indikator Kinerja Utama (Key Performance indicator)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dimenangkan KPU Kabupaten	advokasi, misalnya menyusun jawaban Termohon masih belum merata	SDM untuk melakukan Advokasi	Pengawas an	melakukan advokasi				Sitaro		SDM untuk melakukan Advokasi	

Ditetapkan di Ondong Siau  
pada tanggal 6 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

ttd

STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Kepala Sub-Bagian Hukum



ANITA SOPHYA TAMPI

LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU  
TAGULANDANG BIARO  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO  
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL  
ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG  
BIARO TAHUN 2022

PETA RISIKO

PETA RISIKO

Unit Pemilik Risiko	: KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
Periode Penerapan	: 2022

No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko (8=4x7)	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kurangnya pemahaman SOP dari masing-masing sub bagian.	Pasti	5	1. Kurangnya sosialisasi SOP 2. Kurangnya kontrol terhadap SOP	Besar	4	20	Tinggi
2.	Kepengurusan Parpol yang berubah-ubah	Hampir Pasti	4	1. Dinamika internal partai politik 2. Konflik internal partai politik	Besar	4	16	Tinggi
3.	Dualisme kepengurusan parpol	Hampir Pasti	4	s.d.a	Besar	4	16	Tinggi
4.	Mis-informasi dan kesalahan dokumen yang disampaikan partai politik	Hampir Pasti	4	Petugas Penghubung dan Operator Partai Politik yang sering berganti	Besar	4	16	Tinggi
5.	Kurangnya pemahaman terkait <i>roadmap</i> reformasi birokrasi, area perubahan dan peran agen perubahan serta aspek-aspek Indeks Reformasi Birokrasi	Pasti	5	Kurangnya efektifnya sosialisasi tentang <i>road map</i> reformasi birokrasi, area perubahan dan peran agen perubahan serta aspek-aspek Indeks Reformasi Birokrasi	Besar	4	20	Tinggi
6.	Tidak ada agenda khusus untuk sosialisasi renstra dan target kinerja dalam perjanjian kinerja. Divisi dan unit kerja belum sepenuhnya terlibat dalam penilaian dan evaluasi kinerja dalam penyusunan LAKIP setiap tahun anggaran.	Moderate	3	Tidak ada agenda khusus untuk sosialisasi renstra dan target kinerja dalam perjanjian kinerja. LAKIP hanya disusun oleh sub bagian perencanaan.	Besar	4	12	Sedang
7.	Ketidakpatuhan terhadap prosedur pengelolaan anggaran	Moderate	3	Pengendalian belum dilaksanakan secara menyeluruh terhadap potensi-potensi ketidakpatuhan dalam pengelolaan anggaran	Sedang	3	9	Rendah
8.	Kurangnya pemahaman tentang standar penilaian keterbukaan informasi publik	Hampir Pasti	4	Kurangnya informasi tentang standar penilaian keterbukaan informasi publik	Sedang	3	12	Sedang
9.	Terbatasnya volume kegiatan pendidikan memilih	Moderate	3	Kebijakan anggaran yang belum memadai untuk sosialisasi pendidikan memilih berkelanjutan	sedang	3	9	Rendah
10.	KPPS tidak maksimal	Moderate	3	Pemilih tidak menerima	Besar	4	12	Sedang

No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko (8=4x7)	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	mendistribusikan pemberitahuan untuk menggunakan hak pilih			pemberitahuan untuk menggunakan hak pilih				
11.	Daya jangkau kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih terbatas	Hampir Pasti	4	1. Kendala geografis 2. Keterbatasan akses teknologi dan informasi	Besar	4	16	Tinggi
12.	Masih ada Pemilih yang tidak dapat atau tidak mau menggunakan hak pilihnya	Pasti	5	1. Pemilih tidak memahami mekanisme pindah memilih 2. Adanya kelompok yang tidak menggunakan hak pilihnya karena merasa tidak ada pilihan yang cocok	sedang	3	15	Sedang
13.	Terbatasnya volume kegiatan pendidikan pemilih segmen pemilih perempuan	Moderate	3	Kebijakan anggaran yang belum memadai untuk sosialisasi pendidikan pemilih perempuan	Sedang	3	9	Rendah
14.	Badan adhoc kurang teliti mengisi formulir	Hampir Pasti	4	Pemahaman pengisian formulir dalam bimtek tidak maksimal	Besar	4	16	Tinggi
15.	Pembuatan TPS oleh KPPS tidak sesuai standar aksesibilitas	Hampir Pasti	4	KPPS tidak memahami atau tidak melaksanakan pembuatan TPS sesuai ketentuan	Besar	4	16	Tinggi
16.	Pemilih tidak terdaftar dalam DPT	Pasti	5	1. Kurangnya kesadaran masyarakat 2. Kurangnya sosialisasi 3. Kendala - kendala teknis dalam perekaman KTP-el 4. Faktor geografis	Besar	4	20	Tinggi
17.	PPDP tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur	Hampir Pasti	4	1. Faktor SDM 2. Komitmen dalam melaksanakan tugas 3. Pengawasan dari PPS yang lemah	Besar	4	16	Tinggi
18.	PPDP tidak bisa mendata Pemilih yang pindah domisili tanpa dokumen kependudukan yang sesuai domisili	Hampir Pasti	4	1. Kurangnya kesadaran masyarakat 2. Kurangnya sosialisasi 3. Kendala - kendala teknis dalam penggantian KTP-el 4. Faktor geografis	Besar	4	16	Tinggi
19.	PPDP kesulitan mendata pemilih di LAPAS/RUTAN	Hampir Pasti	4	Dokumen kependudukan tidak dipegang oleh warga binaan di lapas/rutan, bahkan ada yang tidak memiliki dokumen	Besar	4	16	Tinggi

No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko (8=4x7)	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				kependudukan.				
20.	Manajemen pelaksanaan tahapan yang kurang optimal	Moderate	3	1. Perencanaan kurang matang 2. Kuantitas SDM kurang	Sangat Besar	5	15	Sedang
21.	Ujaran kebencian, fitnah dan hoax di media sosial yang memicu konflik	Pasti	5	1. Pemilih/Tim Kampanye tidak bijak dalam menggunakan media sosial 2. Pemilih tidak memahami dampak hukum	Besar	4	20	Tinggi
22.	Tidak meratanya kemampuan SDM untuk melakukan Advokasi	Moderate	3	Kurangnya pemahaman untuk melakukan advokasi	Besar	4	12	Sedang

Ditetapkan di Ondong Siau  
pada tanggal 6 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

ttd

STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN VI  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU  
TAGULANDANG BIARO  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO  
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL  
ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG  
BIARO TAHUN 2022

INDIKATOR RISIKO

INDIKATOR RISIKO

Unit Pemilik Risiko	: KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
Periode Penerapan	: 2022

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko		Batas Aman
					Indikasi	Penjelasan	
1.	Kurangnya pemahaman SOP dari masing-masing sub bagian.	20	3	16	Persentase Sub bagian yang memahami SOP penyusunan keputusan	Semua Sub bagian wajib mengikuti sosialisasi SOP, Pengukuran dilakukan dengan kuesioner pasca sosialisasi	100%
2.	Kepengurusan Parpol yang berubah-ubah	16	5	12	Persentase Partai Politik yang menyampaikan perubahan SK kepengurusan segera setelah adanya perubahan	Perlu adanya komunikasi yang lancar dengan Partai Politik	75%
3.	Dualisme kepengurusan parpol	16	6	12	Persentase Partai Politik yang tidak mengalami dualisme kepengurusan	s.d.a.	75%
4.	Mis-informasi dan kesalahan dokumen yang disampaikan partai politik	16	13	16	Persentase Partai Politik yang menyampaikan dokumen yang benar/tepat untuk keperluan verifikasi Partai Politik	s.d.a.	75%
5.	Kurangnya pemahaman terkait <i>roadmap</i> reformasi birokrasi, area perubahan dan peran agen perubahan serta aspek-aspek Indeks Reformasi Birokrasi	20	2	16	Persentase ASN yang memahami <i>roadmap</i> reformasi birokrasi, area perubahan dan peran agen perubahan	Perlu dilakukan sosialisasi reformasi birokrasi	75%
6.	Tidak ada agenda khusus untuk sosialisasi renstra dan target kinerja dalam perjanjian kinerja. Divisi dan unit kerja belum sepenuhnya terlibat dalam penilaian dan evaluasi kinerja dalam penyusunan LAKIP setiap tahun anggaran.	9	20	9	Persentase unit kerja yang mengikuti sosialisasi Renstra dan Perjanjian Kinerja serta terlibat dalam penyusunan evaluasi kinerja dalam LAKIP	Perlu adanya agenda khusus sosialisasi renstra dan Perjanjian Kinerja serta tim penyusunan LAKIP yang melibatkan semua divisi /sub bagian	100%
7.	Ketidakpatuhan	12	16	10	Persentase SDM	Perlu	100%



No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko		Batas Aman
					Indikasi	Penjelasan	
	terhadap prosedur pengelolaan anggaran				pengelola keuangan yang memahami dan melaksanakan prosedur pengelolaan anggaran dengan benar	dilakukan Bimtek pengelolaan keuangan dan internalisasi peraturan keuangan yang baru	
8.	Kurangnya pemahaman tentang standar penilaian keterbukaan informasi publik	12	17	10	Persentase personil PPID yang memahami standar penilaian dan SOP pelayanan Informasi Publik	Perlu adanya Bimtek Pelayanan Informasi Publik	80%
9.	Terbatasnya volume kegiatan pendidikan pemilih	9	21	9	Persentase peningkatan anggaran dan/atau volume kegiatan pendidikan pemilih dibandingkan dengan anggaran Pemilu dan Pilkada terakhir	Dibandingkan dengan anggaran pendidikan pemilih saat Pemilu 2019 dan Pilkada 2020	50%
10.	KPPS tidak maksimal mendistribusikan pemberitahuan untuk menggunakan hak pilih	12	19	12	Persentase Surat Pemberitahuan Menggunakan Hak Pilih (Form C-Pemberitahuan) yang didistribusikan KPPS kepada pemilih yang masih memenuhi syarat	jumlah Form C-Pemberitahuan yg didistribusikan dibahagi dengan (Jml DPT-Pemilih DPT yg TMS)	95%
11.	Daya jangkau kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih masih terbatas	16	7	14	Persentase Jumlah Kampung/Kelurahan yang terjangkau oleh kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh KPU Kabupaten, PPK atau PPS	Dibarengi dengan pemetaan daerah partisipasi rendah dan optimalisasi anggaran	95%
12.	Masih ada Pemilih yang tidak dapat atau tidak mau menggunakan hak pilihnya	15	15	12	Persentase kelompok potensial golput yang teridentifikasi yang terjangkau oleh kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih	Perlu disusun indikator kelompok potensial golput dan dilakukan identifikasi serta dihitung jumlahnya	80%
13.	Terbatasnya volume kegiatan pendidikan pemilih segmen perempuan	9	22	9	Persentase Kampung/Kelurahan yang partisipasi pemilih perempuannya rendah, yang terjangkau kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih segmen pemilih perempuan	Perlu diidentifikasi daerah Desa/Kelurahan yang partisipasi pemilih perempuannya rendah	85%
14.	Badan adhoc kurang teliti mengisi formulir	16	12	16	Persentase KPPS dan PPK yang terlatih melalui bimtek dan mahir mengisi formulir	Perlu ada evaluasi tingkat pemahaman badan ad hoc dalam pelaksanaan bimtek	90%
15.	Pembuatan TPS	16	10	14	Prosentase TPS yang	Perlu ada kartu	90%

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko		Batas Aman
					Indikasi	Penjelasan	
	oleh KPPS tidak sesuai standar aksesibilitas				aksesibel berdasarkan panduan pembuatan TPS yang disusun KPU	kendali untuk memastikan persyaratan aksesibilitas TPS telah terpenuhi	
16.	Pemilih tidak terdaftar dalam DPT	20	1	16	Penurunan jumlah DPTb (Pengguna hak pilih dengan KTP-El karena tidak terdaftar dalam DPT) di Desa/Kelurahan	Perlu optimalisasi mekanisme partisipasi publik dan pemangku kepentingan dalam pengecekan keterdaftar dalam DPT	90%
17.	PPDP tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur	16	8	14	Persentase PPDP yang melaksanakan Coklit sesuai prosedur (SOP)	Perlu perbaikan mekanisme rekrutmen dan Bimtek PPDP, serta perlunya SOP Coklit dan mekanisme kontrol kinerja PPDP oleh PPS	95%
18.	PPDP tidak bisa mendata Pemilih yang pindah domisili tanpa dokumen kependudukan yang sesuai domisili	16	9	14	Persentase pemilih yang memiliki dokumen kependudukan (KTP-El)	Perlunya ada data berbasis Desa/Kelurahan terhadap jumlah wajib pilih yang belum memiliki KTP-El atau pindah domisili tanpa perubahan alamat KTP-El sebelum tahapan Pemilu	90%
19.	PPDP kesulitan mendata pemilih di LAPAS/RUTAN	16	11	14	Persentase pemilih Lapas/Rutan yang memiliki KTP-El	Perlu pendataan kepemilikan KTP-El di Lapas dan Rutan sebelum tahapan pemutakhiran data pemilih	80%
20.	Manajemen pelaksanaan tahapan yang kurang optimal	15	14	12	Persentase KPU Kabupaten melaksanakan rapat persiapan/perencanaan setiap tahapan	Perlu adanya Bimtek Perencanaan Tahapan dan mekanisme kontrol terhadap perencanaan, persiapan dan pelaksanaan setiap tahapan	100%
21.	Ujaran kebencian, fitnah dan hoax di media sosial yang memicu konflik	20	4	16	Persentase KPU Kabupaten, PPK dan PPS yang melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih memanfaatkan media	Perlu adanya materi tentang strategi pencegahan hoax dan medsos dalam Bimtek	95%

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko		Batas Aman
					Indikasi	Penjelasan	
					sosial untuk mencegah hoax, ujaran kebencian dan fitnah di media sosial		
22.	Tidak meratanya kemampuan SDM untuk melakukan Advokasi	12	18	12	Persentase divisi hukum, kasubag dan staf di KPU Kabupaten yang memiliki kompetensi advokasi masalah hukum	Perlu ada mekanisme evaluasi untuk mengukur kompetensi peserta Bimtek	100%

Ditetapkan di Ondong Siau  
pada tanggal 6 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

ttd

STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
Kepala Sub-Bagian Hukum



LAMPIRAN VII  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU  
TAGULANDANG BIARO  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO  
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL  
ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG  
BIARO TAHUN 2022

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko	: KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
Periode Penerapan	: 2022

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penganggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	Penurunan jumlah DPTb (Pengguna hak pilih dengan KTP-El karena tidak terdaftar dalam DPT) di Desa/Kelurahan	90%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Pengatan Bimtek PPDP dan penguatan kordinasi hasil cokit	Laporan	1	Tahun 2023 - 2024	Divisi Perencanaan Data dan Informasi	-
2	Persentase ASN yang memahami roadmap reformasi birokrasi, area perubahan dan peran agen perubahan	75%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Sosialisasi RB kepada ASN	Laporan sosialisasi	1	Tahun	Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM	-
3	Persentase Sub bagian yang memahami SOP penyusunan keputusan	100%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Sosialisasi SOP Penyusunan Keputusan, dan dilakukan pengukuran tingkat pemahaman melalui kuesioner pasca sosialisasi	Laporan dan Evaluasi Tingkat Pemahaman	1	Tahun (2020-2024)	Divisi Hukum dan Pengawasan	-
4	Persentase KPU Kabupaten, PPK dan PPS yang melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih memanfaatkan media sosial untuk mencegah hoax, ujaran kebencian dan fitnah di media sosial	95%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Optimalisasi akun medsos KPU Kabupaten /PPK/PPS untuk pendidikan politik pencegahan hoax, ujaran kebencian dan fitnah di media sosial	Laporan Sosialisasi	1	Tahun 2022 - 2024	Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM	-
5	Persentase Partai Politik yang menyampaikan perubahan SK kepengurusan	75%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Rakor dan Sosialisasi UU Parpol dan PKPU Tata Cara Verifikasi Parpol	Laporan Rakor dan Sosialisasi	1	Tahun (2022-2023)	Divisi Teknis Penyelenggaraan	-

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penganggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
	segera setelah adanya perubahan			dengan Partai Politik					
6	Persentase Partai Politik yang tidak mengalami dualisme kepengurusan	75%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Memaksimalkan Helpdesk SIPOL	Laporan Helpdesk	1	Bulanan (2022-2024)	Divisi Teknis Penyelenggaraan	-
7	Persentase Jumlah Kampung/Kelurahan yang terjangkau oleh kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh KPU Kabupaten, PPK atau PPS	95%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih berbasis Desa dengan prioritas desa/kelurahan yang memiliki tingkat partisipasi rendah	Laporan dan rekapitulasi kegiatan sosialisasi	1	Tahunan	Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM	-
8	Persentase PPDP yang melaksanakan Coklit sesuai prosedur (SOP)	95%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Bimtek PPDP dan Monev secara berkala	Laporan Bimtek dan Monev Kinerja PPDP	2	Tahun (2023-2024)	Divisi Perencanaan Data dan Informasi	-
9	Persentase pemilih yang memiliki dokumen kependudukan (KTP-El)	90%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Koordinasi dan percepatan perekaman sebelum tahapan coklit	laporan koordinasi	1	Tahunan (2023-2024)	Divisi Perencanaan Data dan Informasi	-
10	Prosentase TPS yang aksesibel berdasarkan panduan pembuatan TPS yang disusun KPU	90%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Panduan pembuatan TPS yang aksesibel untuk KPPS	Laporan sosialisasi dan laporan kartu kendali secara berjenjang	2	Tahun 2024	Divisi Teknis Penyelenggaraan	-
11	Persentase pemilih Lapas/Rutan yang memiliki KTP-El	80%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Koordinasi dengan pihak Lapas/Rutan serta Dinas Dukcapil untuk kejelasan dokumen kependudukan warga binaan/tahanan	laporan koordinasi	1	Tahunan	Divisi Perencanaan Data dan Informasi	-
1	Persentase	90%	Mengurangi	Bimtek PPK	lapora	1	Tahu	Divis	-

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penganggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
2	KPPS dan PPK yang terlatih melalui bimtek dan mahir mengisi formulir		kemungkinan terjadinya risiko	dan PPS dengan target kompetensi pengisian formulir	n Bimtek Pengisian Formulir		nan (2022-2023)	Teknis Penyelenggaraan	
13	Persentase Partai Politik yang menyampaikan dokumen yang benar/tepat untuk keperluan verifikasi Partai Politik	75%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Rakor penjelasan detail persyaratan dokumen verifikasi Parpol dan penggunaa n Sipol	Laporan	1	Tahun 2023	Divisi Teknis Penyelenggaraan	-
14	Persentase KPU Kabupaten melaksanakan rapat persiapan/perencanaan setiap tahapan	100%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Rakor penyusunan perencanaan detail pelaksanaan tahapan disertai kerangka evaluasi kesiapan dan capaian setiap detail kegiatan	Laporan Rakor	2	Tahun	Divisi Perencanaan Data dan Informasi	-
15	Persentase kelompok potensial golput yang teridentifikasi yang terjangkau oleh kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih	80%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Identifikasi kelompok potensial golput dan sosialisasi kepada kelompok potensial golput	laporan kegiatan identifikasi dan sosialisasi	1	Tahun	Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM	-
16	Persentase SDM pengelola keuangan yang memahami dan melaksanakan prosedur pengelolaan anggaran dengan benar	100%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Bimtek prosedur pengelolaan anggaran	Laporan Bimtek	2	Semester	Divisi Keuangan , Umum, RT dan Logistik	-
17	Persentase personil PPID yang memahami standar penilaian dan SOP pelayanan Informasi Publik	80%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Bimtek/Internalisasi SOP kepada personil PPID	Laporan Bimtek /Internalisasi SOP	2	Tahun	Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM	-
1	Persentase	100%	Mengurangi	Bimtek	lapora	1	Tahu	Divisi	-

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penganggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
8	divisi hukum, kasubag dan staf di KPU Kabupaten yang memiliki kompetensi advokasi masalah hukum		kemungkinan terjadinya risiko	advokasi masalah hukum	n Bimtek dan evaluasi kompetensi advokasi		nan (2023-2023)	Hukum dan Pengawasan	
19	Persentase Surat Pemberitahuan Menggunakan Hak Pilih (Form C-Pemberitahuan) yang didistribusikan KPPS kepada pemilih yang masih memenuhi syara	95%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Penguatan pengawasan dan tindakan koreksi oleh PPS serta laporan secara berjenjang terhadap distribusi Formulir Pemberitahuan Menggunakan Hak Pilih	laporan rekapitulasi per PPS (Pemilu dan pemilihan Tahun 2024)	2	Tahunan (tahunan tung sura)	Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM	-
20	Persentase unit kerja yang mengikuti sosialisasi Renstra dan Perjanjian Kinerja serta terlibat dalam penyusunan evaluasi kinerja dalam LAKIP	100%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Sosialisasi Renstra dan Perjanjian Kinerja serta Agenda khusus pembahasan LAKIP dan evaluasi kinerja	Laporan Sosialisasi, LAKIP, LHE dan SAKIP	3	Tahunan	Divisi Perencanaan Data dan Informasi	-
21	Persentase peningkatan anggaran dan/atau volume kegiatan pendidikan pemilih dibandingkan dengan anggaran Pemilu dan Pilkada terakhir	50%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Revisi anggaran untuk peningkatan volume kegiatan sosialisasi	Laporan revisi anggaran	1	Tahunan	Divisi Perencanaan Data dan Informasi	-
22	Persentase Kampung/ Kelurahan yang partisipasi pemilih perempuannya rendah, yang terjangkau kegiatan sosialisasi dan pendidikan	85%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Identifikasi Desa/ Kecamatan yang partisipasi pemilih perempuan nya rendah untuk dilaksanak an kegiatan pendidikan	laporan kegiatan identifikasi dan sosialisasi	1	Tahunan (2022-2023)	Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM	-



No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penganggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
	pemilih segmen pemilih perempuan			pemilih segmen pemilih perempuan					

Ditetapkan di Ondong Siau  
pada tanggal 6 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

ttd

STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
Kepala Sub Bagian Hukum



ANITA SOPVA TAMPI